

Jaringan Aktor dalam Tata Kelola Kolaborasi Industri Pariwisata di Kabupaten Kuningan

Anwar Rosshad^{1*}, Nur Saribulan¹, Vinda Verina Kartika Dewi Primasari¹

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 2, 2024

Revised October 28, 2024

Accepted November 4, 2024

Available online December 31, 2024

Kata Kunci:

Jaringan Aktor; Tata Kelola Kolaborasi; Pariwisata

Keywords:

Actor Network; Collaboration Governance; Tourism



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan jaringan aktor dalam tata kelola kolaborasi industri pariwisata dengan mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat dan seberapa besar peran jaringan aktor tersebut dalam pencapaian tujuan industri pariwisata yang di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Social Network Analysis (SNA)*. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan *in-depth interview* pada aktor yang terlibat dalam tata kelola industri pariwisata di kabupaten Kuningan serta didukung data sekunder berupa aturan, laporan, dokumen atau informasi pada *website* yang relevan. Analisis data dilaksanakan dengan mengidentifikasi hubungan antar aktor dengan melihat koneksi struktur antar jaringan antar aktor dengan menggunakan *software R-studio*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan industri pariwisata di kabupaten Kuningan tata kelola kolaborasi penyelenggaraan pariwisata telah dilaksanakan namun belum terjadi secara optimal, karena perspektif masing-masing aktor yang melaksanakan kolaborasi didasarkan atas

perspektif normatif, dimana kesadaran kolaborasi masih dilaksanakan karena didasarkan pembagian urusan, tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing. Sehingga, terlihat aktor yang paling dominan adalah DISPORAPAR selaku penanggung jawab urusan kepariwisataan serta BAPPEDA selaku badan yang menginventarisir perencanaan dan penganggaran kegiatan atau program pariwisata pada masing-masing dinas terkait.

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the actor-network in the collaborative governance of the tourism industry by identifying the actors involved and the role of the actor-network in achieving the goals of the tourism industry in Kuningan Regency, West Java Province. This research utilizes qualitative methods with a *Social Network Analysis (SNA)* approach. Data collection involves *in-depth interviews* with actors involved in tourism governance in Kuningan Regency, supported by secondary data from regulations, reports, documents, or information based on websites. Data analysis was carried out using *social network analysis (SNA)*, which identified relationships between actors by examining network structure connections using *R-studio software*. The results indicate that while collaborative governance in the tourism industry of Kuningan Regency has been implemented, it has not yet been optimized. The current collaboration is based on a normative perspective, where the awareness of collaboration is driven by the division of affairs, duties, and functions according to their respective fields. As a result, DISPORAPAR is identified as the most dominant actor responsible for tourism affairs. At the same time, BAPPEDA oversees the planning and budgeting-related agencies for other state actors involved in tourism affairs.

1. PENDAHULUAN

Pariwisata memegang salah satu sumber perekonomian yang berpotensi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, bahkan di beberapa wilayah, pariwisata merupakan sumber utama penghasilan daerah atau bahkan negara (Temiraliyeva et al., 2021). Studi tentang pariwisata telah banyak mendapatkan perhatian diantaranya adalah studi tentang strategi pengembangan pariwisata melalui *e-tourism*, strategi pengembangan wisata kuliner, pengembangan melalui budaya lokal, transportasi dan pengembangan

*Corresponding author

E-mail addresses: rosshadanwar@gmail.com

pariwisata halal (Abror & Manullang, 2019; Hamzana, 2018; Irfan & Apriani, 2017; Kristiana et al., 2018; Masniati et al., 2021).

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Barat dengan wilayah geografis yang mendukung dalam aktivitas rekreasi. Selain pertanian dan peternakan, Kabupaten Kuningan memiliki banyak potensi di bidang pariwisata. Sebagai salah satu upaya dalam pengembangan potensi wisata sebenarnya sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kuningan telah berupaya dalam mengentaskan permasalahan kesejahteraan masyarakat melalui industri pariwisata dengan mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pariwisata, diantaranya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata serta beberapa kebijakan lain seperti pengembangan desa wisata seperti pada Keputusan Bupati Kuningan Nomor 556/KPTS 628-DISPORAPAR/2018 serta Peraturan Bupati Kuningan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Desa Pinunjul Kabupaten Kuningan. Tujuan utama dari pembentukan aturan tersebut adalah guna mendapatkan dukungan dari seluruh aktor (stakeholder) yang terlibat dalam upaya peningkatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan, karena pada prosesnya pengembangan industri pariwisata memerlukan bantuan dari seluruh aktor, bukan hanya dari pemerintah daerah.

Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut telah ditetapkan dan dilaksanakan, namun permasalahan terkait kesejahteraan dan pariwisata masih tetap terjadi di Kabupaten Kuningan. Di tahun 2019 jumlah pengunjung pariwisata mencapai 2.328.359 jiwa dan sempat mengalami penurunan sebanyak 7,22% pada tahun 2020 (1.270.574 jiwa) dan mulai mengalami kenaikan sebesar 1.362.362 jiwa pada tahun 2022 (BPS Kabupaten Kuningan, 2022a). Penurunan jumlah pariwisata tentunya akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk diantaranya pada penerimaan daerah. Beberapa upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisata diantaranya yaitu dengan melaksanakan komunikasi pemasaran pada kelompok penggerak pariwisata di desa wisata serta pembebasan pajak dan pemberian fasilitas gratis pelaku ekonomi di desa objek wisata (Fransisca, 2021); (Suryatman & Setiowati, 2016). Namun faktanya, hingga saat ini Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 yaitu berkisar pada angka 12,76% (BPS Kabupaten Kuningan, 2022b). Angka ini bukanlah angka yang kecil, apalagi jika dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan angka rata-rata nasional (9,54%). Ditambah lagi angka pengangguran terbuka pada tahun 2021 di Kabupaten Kuningan mencapai angka 12% atau setara dengan 63.377 Jiwa (BPS Kabupaten Kuningan, 2022a).

Melihat fenomena kemiskinan dan angka pengangguran yang masih tinggi dengan tipe daerah dengan potensi wisata yang menjanjikan, serta adanya penurunan pada jumlah pengunjung pariwisata di Kabupaten Kuningan, penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana penyelenggaraan industri pariwisata di Kabupaten Kuningan dengan memfokuskan penelitian pada eksplorasi aktor yang terlibat pada proses penyelenggaraan kepariwisataan. Analisis aktor yang terlibat akan sangat membantu dalam memberikan gambaran peran dan seberapa besar peran masing-masing aktor dalam upaya mensukseskan tujuan kebijakan, sehingga diharapkan akan menjadi kontribusi dalam melihat siapa saja aktor yang terlibat dan seberapa besar peran aktor tersebut dalam upaya peningkatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan.

Studi terkait peran aktor yang terlibat pada penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan, sebenarnya pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu bagaimana melihat peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam promosi pariwisata di media sosial, bagaimana model pengembangan desa wisata, serta strategi pengembangannya khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan (Aulya, 2021; Latianingsih, 2019; Masruroh & Nurhayati, 2016; Sugiono & Thoha, 2002). Penelitian lainnya yang juga dilaksanakan dengan memfokuskan pada penggambaran jaringan kebijakan (*policy network*) juga pernah dilaksanakan oleh Mariane dkk yang berjudul Model Policy Network Dalam Menunjang Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jejaring kebijakan pada implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa baik dalam sisi perencanaan dan implementasi kebijakan pariwisata masih dilaksanakan secara parsial/terpisah dimana perencanaan hanya masuk dalam sub sektor kegiatan, dan belum terlihat identifikasi peluang dan kebutuhan. Selain itu, peran aktor hanya difokuskan pada tugas masing-masing sektor dan belum menciptakan hubungan saling menguntungkan, sehingga prinsip jaringan tata kelola dan hubungan antar aktor pelaksana belum dapat tergambarkan (Mariane et al., 2022).

Berangkat dari temuan belum tergambarkannya prinsip tata kelola dan hubungan antar aktor pelaksana industri pariwisata tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dengan upaya dalam mengungkapkan siapa saja aktor yang terlibat dan seberapa penting peran aktor tersebut. Studi tentang jaringan aktor mulai banyak digunakan dalam perkembangan keilmuan sosial termasuk pada sektor pariwisata. Namun, dari beberapa pencarian literatur ataupun penelitian, penelitian terkait jaringan

aktor yang berpengaruh dalam industri pariwisata di Kabupaten Kuningan masih sangat sedikit yang mengulasnya. Studi pada hubungan pentahelix dan hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam masa pandemi covid-19 menjelaskan pentingnya stakeholder yang memahami permasalahan dalam pariwisata membangun komunikasi dengan masyarakatnya (Maturbongs & Lekatompessy, 2020); (Kadarisman, 2021). Kolaborasi merupakan sesuatu hal yang lazim di dunia industri saat ini, termasuk dalam sektor pariwisata dengan berbagai manfaat, motif, bentuk dan penggerakannya (Fyall & Garrod, 2005).

Jaringan aktor pada pariwisata dapat dilihat atau dipelajari dengan melihat *Social Network Analysis* (SNA), dimana jaringan ini digunakan dalam menganalisis sekumpulan atribut ilmu sosial baik berupa jaringan yang terbentuk dari sekumpulan aktor (biasa disebut *nodes*) dan koneksi hubungan yang terjadi diantara para aktornya (Baggio, 2020; González et al., 2022). Dalam konteks praktis, pemetaan jaringan aktor ini dapat membantu menghasilkan dasar/fondasi guna merancang desain dan pengelolaan kegiatan industri pariwisata pada suatu sistem yang kompleks (Baggio, 2020). Beberapa aspek dalam suatu sistem pengelolaan sumber daya berbasis alam seperti memori sosial, heterogenitas, redundansi, kemampuan adaptasi dan kepercayaan merupakan aspek yang penting, dimana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh struktur jaringan aktor yang terbentuk dalam suatu sistem. Dengan melihat aspek-aspek tersebut maka akan terlihat bagaimana model struktur jaringan yang akan terbentuk dengan melihat bagaimana daya jangkau dari peran aktor (*reachability* dan *density*), tingkat tertentu pemisahan kelompok dalam jaringan (*betweenness*) dan kelompok atau aktor pusat dalam suatu jaringan (*centrality*) (Bodin et al., 2006a). Pengungkapan jaringan aktor dalam SNA juga dapat dimaknai dengan menjelaskan hubungan langsung dan tidak langsung, dimana untuk melihat seberapa penting aktor dalam suatu jaringan dapat terlihat dari seberapa jauh atau dekat jarak antara satu aktor dengan aktor lainnya (*closeness or distance*), posisi antar satu aktor dengan aktor lainnya (*betweenness*), aktor dengan relasi terbanyak dan hubungan antar aktor lainnya (*outdegree*) serta jumlah hubungan antar aktor dalam suatu jaringan (*centrality*) (Hanneman & Riddle, 2005; Wasserman & Faust, 1994).

Melalui pengamatan SNA, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan/keberlanjutan penelitian terkait jaringan aktor yang belum tergambarkan pada pengembangan industri pariwisata yang ada di Kabupaten Kuningan dengan memfokuskan pertanyaan penelitian pada bagaimana jaringan aktor kolaborasi dalam tata kelola industri pariwisata di Kabupaten Kuningan. Dalam penelitian ini argumen awal yang terbentuk adalah untuk menciptakan suatu tata kolaborasi, maka jaringan aktor yang harusnya ada dalam mendukung kolaborasi adalah dengan melibatkan aktor seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta kelompok kepentingan dengan melihat tingkat *closeness or distance*, *betweenness*, *centrality* (*in-degree* and *outdegree*) (Hanneman & Riddle, 2005; Wasserman & Faust, 1994). Dengan melihat ketiga bagian tersebut, studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan ataupun mengeksplorasi bagaimana struktur aktor yang terlibat pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan sehingga dapat menjadi rujukan dalam memetakan jaringan aktor yang berpengaruh dalam industri pariwisata baik dalam ranah praktis, maupun pengembangan keilmuan terkait jaringan aktor dalam pengembangan industri pariwisata dari sisi teoretis, sehingga dapat membantu memahami secara lebih komprehensif.

Dalam penyusunan hasil penelitian dalam studi ini akan dibagi ke dalam empat bagian. Pada bagian pertama, akan dijelaskan terkait rasional, latar belakang studi pariwisata dan lokasi daerah ini dipilih serta rivi literatur terkait pariwisata dan jaringan aktor. Pada bagian kedua akan dijelaskan terkait metode yang dipilih beserta langkah-langkah dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Pada bagian ketiga akan dibahas terkait hasil dan pembahasan. Kemudian, yang terakhir adalah ringkasan dan juga penjelasan limitasi dan prospek topik yang belum terungkap yang menjadi batasan dan memungkinkan untuk diteliti kedepannya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA). SNA adalah metode yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pola hubungan yang muncul dari interaksi sosial dengan melihat simpul jaringan (*nodes*) aktor yang terlibat antara individu atau entitas dalam jaringan sosial (Bigbox, n.d.; Bimo Pratama, 2020; Maulana, n.d.). SNA merupakan metode penelitian yang menggunakan alat matematika dan komputasi untuk menganalisis jaringan sosial. Metode ini digunakan untuk mempelajari struktur hubungan antar aktor dalam jaringan, seperti individu, organisasi, atau negara. SNA dapat diterapkan di berbagai bidang, antara lain pariwisata, tata kelola lingkungan, dan jaringan informasi *online* (Altuntas et al., 2022; Feng et al., 2013; Li et al., 2022; Ruan et al., 2022; Yang et al., 2022; Yi et al., 2020).

Pada penelitian ini, SNA digunakan untuk mempelajari struktur hubungan antar aktor dalam tata kelola kolaborasi industri pariwisata di Kabupaten Kuningan. Metode SNA dipilih karena penulis ingin menganalisis pola jaringan aktor dalam tata kelola kolaborasi industri pariwisata di Kabupaten Kuningan, dengan melihat bagaimana masing-masing aktor pada industri pariwisata terlibat, bagaimana hubungan

yang terjadi, dengan siapa saja jaringan terhubung, seberapa kuat hubungannya serta bagaimana model hubungannya sehingga peneliti mendapatkan gambaran siapa saja aktor kunci yang terpenting dan juga pendukung dalam mensukseskan upaya pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Kuningan (Leksmanawati, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui *in-depth interview* dengan aktor-aktor kunci yang terlibat dalam tata kelola kolaborasi industri pariwisata di Kabupaten Kuningan. Penentuan aktor ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menentukan aktor berdasarkan peran dan fungsinya yang tercantum pada aturan dan dokumen yang relevan yang berkaitan dengan pariwisata, selain itu teknik *snowball sampling* juga dilaksanakan dalam menjangkau informan yang penting, namun tidak secara spesifik tertulis di dalam aturan seperti misalnya pemilik atau pelaku usaha industri ataupun pengunjung pariwisata. Selain *interview*, data sekunder berupa laporan, dokumen koordinasi maupun dokumen pemerintah serta informasi pada *website* dan peraturan yang berlaku akan digunakan sebagai bahan analisis.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis jaringan aktor. Analisis jaringan aktor adalah metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara berbagai aktor dalam merumuskan sebuah kebijakan, dalam hal ini pemerintah tidak hanya berperan sebagai aktor tunggal, namun adanya aktor diluar pemerintah seperti kelompok profesional, LSM, masyarakat dan *stakeholder* lainnya yang berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan, (Ariyani et al., 2020; Taufik, 2017; Utami et al., 2021). Untuk memastikan keabsahan validitas dan reliabilitas data, maka peneliti melaksanakan triangulasi dengan mengacu pada analisis data yang berbeda sumber seperti triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data (Denzin & Lincoln, 2018).

Analisis SNA akan dilaksanakan dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan selama penelitian di lapangan berlangsung. Kedua data ini akan dipilah dan dipilih sesuai kebutuhan analisis. Analisis data akan dilakukan dengan bantuan *software* R-studio, dengan alasan bahwa R-studio merupakan komputasi pemograman komputasi statistik dan grafik dengan *open source* yang menyediakan banyak *package* yang memudahkan dalam analisis, transformasi dan pemrosesan data yang sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian (R studio, 2022).

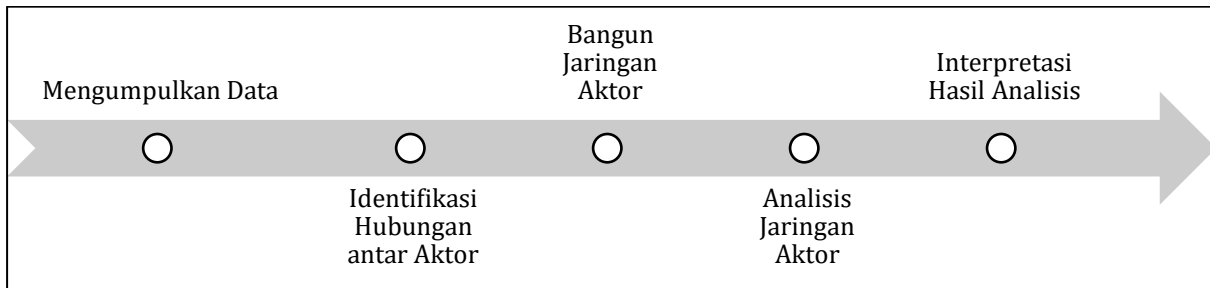
Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan ataupun mengeksplorasi bagaimana struktur aktor yang terlibat pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan, analisis jaringan aktor akan digunakan untuk menganalisis hubungan antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan kelompok pengguna (*user groups*) (Hanneman & Riddle, 2005; Wasserman & Faust, 1994). Dengan melihat aspek-aspek tersebut maka akan terlihat bagaimana model struktur jaringan yang akan terbentuk dengan melihat bagaimana daya jangkau dari peran aktor (*closeness*) tingkat tertentu pemisahan kelompok dalam jaringan (*betweenness*) dan kelompok atau aktor pusat dalam suatu jaringan (*centrality*) (Bodin et al., 2006).

Degree centrality digunakan untuk melihat siapa yang menjadi aktor kunci (aktor yang paling berperan) atau aktor yang memiliki hubungan paling banyak dengan aktor lainnya dalam suatu jaringan kolaborasi. *Degree centrality* ini jugalah yang digunakan digunakan untuk mengukur *closeness* dan *betwenness centrality*. Sedangkan *closeness centrality* digunakan untuk mengukur kedekatan antar aktor yang satu dengan yang lainnya. Adapun *Betweenness Centrality* adalah untuk melihat aktor penghubung (jembatan) pada suatu jaringan.

Pada pengungkapan jaringan aktor kolaborasi, visualisasi gambar jaringan terdapat dua istilah yang digunakan yaitu titik simpul, dalam hal ini yaitu aktor yang terlibat (*node*) dan garis hubungan/interaksi (*edge*). Pada *degree centrality* pengukuran dilakukan melihat jumlah koneksi/interaksi dari sebuah *node* ke *node* lainnya, dengan memberikan labeling nilai 0 (jika tidak terdapat hubungan) dan nilai 1 (jika terdapat hubungan). Sedangkan koefisien *closeness centrality* diukur dengan menghitung jarak rata-rata kedekatan atau jarak minimum antara suatu *node* dengan semua *node* dalam jaringan. Pada *betwenness centrality* dihitung dengan mengukur seberapa banyak suatu *node* dilalui oleh *nodes* yang lain.

Langkah-langkah dalam menggunakan metode penelitian jaringan aktor dalam tata kelola kolaborasi industri pariwisata menggunakan RStudio:

- 1) Mengumpulkan data tentang aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola kolaborasi industri pariwisata di Kabupaten Kuningan.
- 2) Identifikasi hubungan antara aktor-aktor. Hubungan dapat diidentifikasi berdasarkan interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor.
- 3) Bangun jaringan aktor. Jaringan aktor dapat dibangun dengan menggunakan perangkat lunak RStudio.
- 4) Analisis jaringan aktor.
- 5) Interpretasi hasil analisis.



Sumber: diolah penulis, 2023

Gambar 1. Proses Analisis Data SNA

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pengembangan sektor pariwisata merupakan tantangan bagi pemerintah daerah, dimana dalam prosesnya membutuhkan campur tangan dari berbagai pemangku kepentingan. Di Kabupaten Kuningan, pengaturan pengelolaan pariwisata diatur dalam (Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Pedoman, 2013) Pedoman ini digunakan dalam upaya menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Kuningan agar lebih berkembang, sehingga diharapkan pariwisata dapat menjadi nilai tambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berakhir dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan lembaga teknis yang berwenang dalam pengaturan pariwisata, dijelaskan berdasarkan uraian tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk lembaga teknis yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan urusan pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR). DISPORAPAR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang Pemuda dan Olahraga dan urusan pemerintahan pilihan di bidang Pariwisata. Meskipun dalam hal ini DISPORAPAR merupakan lembaga teknis penyelenggara urusan pariwisata, namun dalam pelaksanaannya, pada pengelolaan pariwisata juga melibatkan unsur dinas ataupun badan lain yang terdampak oleh aktivitas pariwisata.

Permasalahan menarik lainnya adalah meskipun kabupaten Kuningan memiliki banyak tempat rekreasi, namun beberapa lokasi wisata tersebut justru merupakan Kawasan hutan lindung atau Kawasan hutan konservasi. Dalam hal ini, pengaturan dan pengelolaan hutan tersebut menjadi kewenangan

Taman Nasional Gunung Ciremai, sehingga pengelolaannya tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh DISPORAPAR, melainkan harus melalui Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) dan Perum Perhutani/Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dijelaskan secara umum bahwa pemangku kebijakan penyelenggaraan pariwisata pada Kabupaten Kuningan bukan hanya melibatkan DISPORAPAR sebagai dinas teknis yang berwenang dalam menangani masalah pariwisata, namun juga ternyata melibatkan aktor lainnya seperti dinas atau badan lain baik yang bersinggungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan pariwisata dan termasuk juga instansi vertikal, pihak swasta (termasuk perusahaan ataupun perorangan) dan Perguruan Tinggi. Pemetaan aktor yang terlibat pada sector pariwisata pada Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel 1.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam analisis jaringan aktor, SNA dapat digunakan dalam menggambarkan interaksi aktivitas suatu objek, yang mana pada penelitian ini, aktivitas objek yang dianalisis adalah hubungan antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Pada analisis jaringan ini penggambaran aktor dimulai dengan mengidentifikasi aktor berdasarkan hasil wawancara serta dokumen perencanaan maupun dokumen laporan yang memuat aktivitas kepariwisataan seperti yang tersaji pada Tabel 1.

Dengan analisis SNA, aktor tersebut kemudian digambarkan dengan mengaitkan hubungan antara satu aktor dengan aktor lainnya yang nantinya hubungan tersebut akan menghasilkan jaringan social atau simpul jaringan berupa *nodes*. *Nodes* dalam hal ini digambarkan sebagai aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata yaitu sebanyak 20 *nodes*. Selain *nodes*, terdapat pula *edges* yaitu suatu jaringan yang dimaknai sebagai interaksi yang terjadi antar *nodes* (Agarwal et al., 2019). Selain melihat *nodes*, fungsi SNA lainnya adalah untuk memetakan dan melihat aktor mana yang paling banyak memiliki hubungan dengan aktor lainnya atau biasa disebut sebagai aktor kunci, untuk melihat aktor kunci tersebut dapat dilihat dengan mengukur derajat *centrality* (Hanneman & Riddle, 2005; Wasserman & Faust, 1994). Derajat *centrality* yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin banyak aktor tersebut berinteraksi dengan aktor lainnya.

Tabel 1. Aktor Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kabupaten Kuningan

1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah (BAPPEDA)
2	Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC)
3	Perum Perhutani/KPH Kuningan
4	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
6	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (DPPP)
7	Dinas Pertanian
8	Dinas Koperasi dan UKM
9	Dinas Perhubungan
10	Badan Pendapatan Daerah
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Sekretariat Daerah (Humas, Hukum dan TAPEM)
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
14	Kecamatan
15	Kelurahan/Desa
16	Kelompok Sadar Wisata
17	Perguruan Tinggi
18	Swasta
19	Media Lokal
20	Organisasi/Komunitas Kepariwisata

Sumber: (BAPPEDA Kuningan, 2023; DISPORAPAR Kabupaten Kuningan, 2023)

Pengukuran *degree centrality* dilaksanakan dengan melihat arah interaksi *nodes* yang biasa disebut juga *in-degree* dan *out-degree*. Jika *in-degree* mengukur arah interaksi dari *node* lain ke arah *node* yang akan diamati, maka *out-degree* mengukur interaksi dilihat dari *node* yang diamati ke arah *node* lainnya. Nilai dari *degree centrality* inilah yang kemudian berkaitan dengan nilai *betweenness centrality*, yang mana nilai *betweenness centrality* tergantung dari seberapa banyak *node* yang diamati dilewati/dilalui oleh *node* lainnya. Artinya, semakin tinggi nilai *betweenness centrality* maka semakin tinggi kapasitas aktor dalam menghubungkan interaksi antar aktor yang terhubung. Selain *degree centrality* dan *betweenness centrality* terdapat juga nilai *closeness centrality*, yang mengukur jarak kedekatan rata-rata dari satu *node* ke *node* lainnya. Berdasarkan perhitungan *degree centrality* pada aplikasi R-studio, diperoleh nilai nilai *centrality* setiap aktor terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Degree Centrality

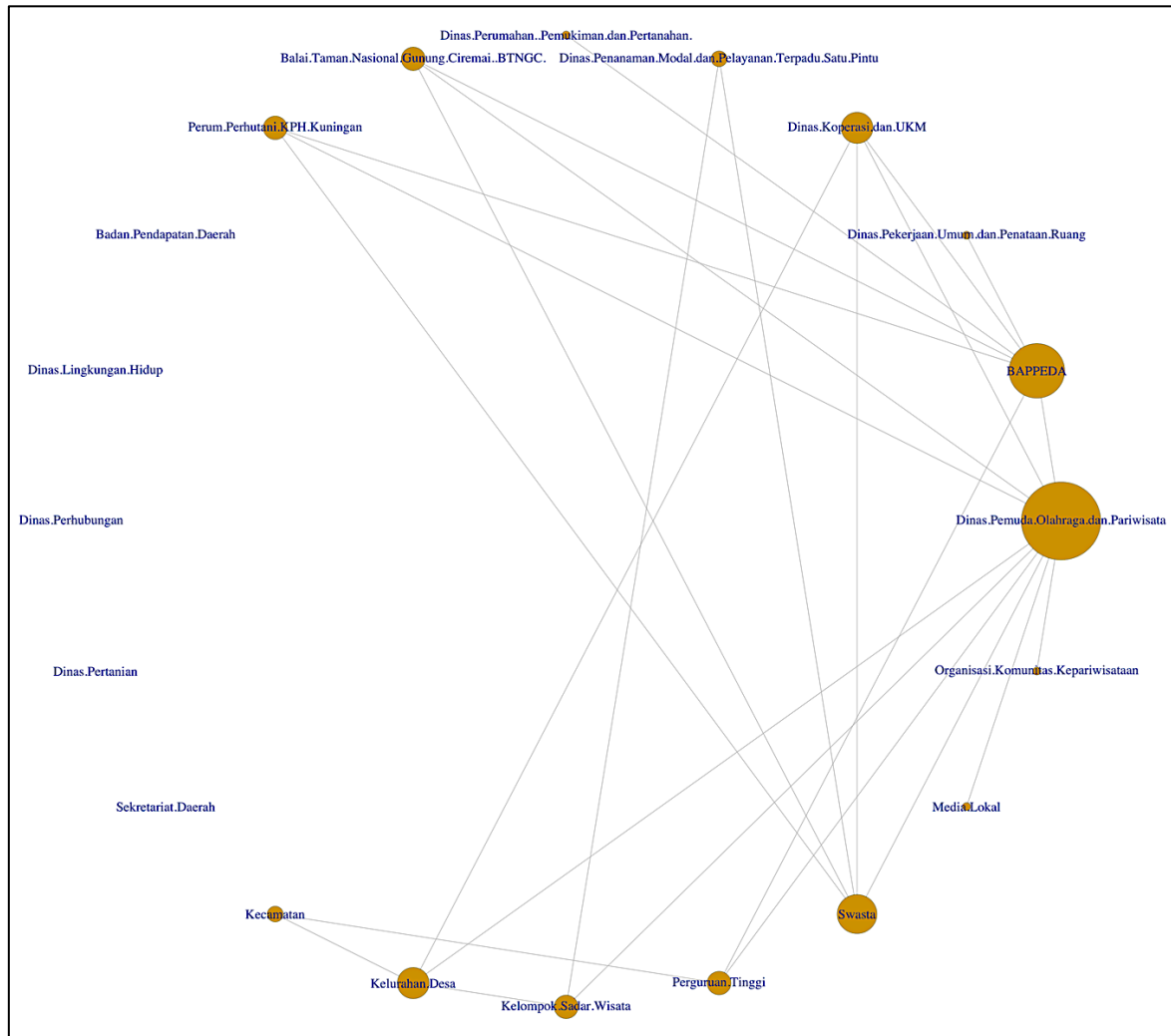
No	Aktor	Degree Centrality	Betweenness	Closeness
1	Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata	20	89.900000	0.05555556
2	BAPPEDA	14	56.333333	0.04545455
3	Swasta	10	16.800000	0.03846154
4	Dinas Koperasi dan UKM	8	7.366667	0.04166667
5	Kelurahan/Desa	8	12.666667	0.03846154
6	Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC)	6	2.700000	0.03846154
7	Perum Perhutani/KPH Kuningan	6	2.700000	0.03846154
8	Kelompok Sadar Wisata	6	9.200000	0.03703704
9	Perguruan Tinggi	6	12.333333	0.03846154
10	DPMPTSP	4	1.000000	0.02857143
11	Kecamatan	4	1.000000	0.02941176
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	0.000000	0.02857143
13	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	2	0.000000	0.02857143
14	Media Lokal	2	0.000000	0.03225806
15	Komunitas/Paguyuban Pengelola Objek Wisata	2	0.000000	0.03225806
16	Dinas Pendapatan Daerah	0	0.000000	0.00000000
17	Dinas Lingkungan Hidup	0	0.000000	0.00000000
18	Dinas Perhubungan	0	0.000000	0.00000000
19	Dinas Pertanian	0	0.000000	0.00000000
20	Sekretariat Daerah	0	0.000000	0.00000000

Sumber: Diolah peneliti (2023)

Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan nilai *centrality*, *betweenness* dan *closeness* masing-masing aktor pada penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Dari tabel terlihat bahwa terdapat 1 (satu) aktor yaitu DISPORAPAR dengan ketiga nilai derajat *centrality*, *betweenness* dan *closeness* tertinggi

dibandingkan dengan yang lainnya dengan skor *degree centrality* mencapai 20, *betweenness* 89.900000 dan *closeness* sebesar 0.05555556. Hal ini menunjukkan bahwa dinas tersebut berperan sebagai aktor kunci pada penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Sementara itu, terdapat 2 (dua) aktor dengan skor *centrality* diatas 10, sedangkan sisanya merupakan aktor dengan nilai *centrality* dibawah 10.

Selain digunakan dalam menghitung ketiga derajat sentralitas antar jaringan, R-studio juga dapat memvisualisasikan hubungan antar *nodes* dan menyajikan *edges* yang terbentuk dalam proses dimana aktor-aktor tersebut saling berinteraksi. Visualisasi jaringan antar aktor pada penelitian ini tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Visualisasi Jaringan Aktor Penyelenggara Pariwisata Kabupaten Kuningan

Visualisasi jaringan aktor yang terlibat pada kegiatan pariwisata di Kabupaten Kuningan pada gambar 2 memperlihatkan beberapa aktor yang tergambar pada *nodes* dan relasinya yang tergambar dalam *edges*. Terdapat 20 *nodes* dan 50 *edges* pada gambar tersebut, yang artinya terdapat 20 aktor yang terlibat dengan 50 hubungan/interaksi antar aktornya. Pada gambar terlihat juga terdapat beberapa aktor yang memiliki peran namun tidak termasuk dalam rangkaian jaringan seperti Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Sekretariat Daerah.

Pada hasil pengukuran nilai *centrality* terlihat bahwa DISPORAPAR merupakan aktor yang memiliki nilai *centrality* dan *betwensness centrality* yang paling tinggi yaitu sebesar 20 dan 89.900000. Tingginya angka *centrality* tersebut dapat diinterpretasikan bahwa DISPORAPAR merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan urusan pariwisata yang ada di Kabupaten Kuningan. *Degree centrality* yang tinggi menunjukkan bahwa DISPORAPAR sebagai aktor sentral dan menjadi kunci dalam konteks penyelarasn kegiatan teknis dalam pengelolaan urusan pariwisata. *Betweenness centrality* menunjukkan aktor ini sebagai aktor penghubung yang menjembatani aktor-aktor lain dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata,

sedangkan dilihat dari *closeness centrality* aktor ini merupakan aktor yang memiliki akses tercepat dalam berinteraksi dengan aktor lainnya. Aktor sentral ini merupakan poros dalam menyelenggarakan segala urusan kepariwisataan. Aktor ini merupakan aktor dengan tingkat kemudahan komunikasi yang dapat diakses oleh aktor lainnya, Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam urusan pariwisata DISPORAPAR merupakan dinas teknis daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan pilihan di bidang pariwisata, sehingga DISPORAPAR memiliki kewenangan yang luas dalam perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pariwisata, termasuk juga sebagai pelaksana, koordinator dan pembinaan aktor lain yang terlibat dalam industri pariwisata.

Tabel 3. Aktor Utama Pendukung Kegiatan Pariwisata Kuningan

No	Aktor	Peran
1	DISPORAPAR	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan dan penetapan kebijakan teknis kepariwisataan - Pelaksana kebijakan - Koordinator, fasilitator dan pengendalian pelaksanaan - Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
2	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisir kegiatan-kegiatan pariwisata yang bersumber APBD dan APBN) - Mensinkronkan rencana pengembangan pariwisata - Memastikan prioritas kegiatan ekowisata dan lokasi - Mengembangkan kerjasama antar lembaga - Mengelola data terintegrasi pengembangan ekowisata
3	Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Penyedia akses/sarana pariwisata - Penyedia jasa di sekitar lokasi objek wisata - Pemilik modal/investor dalam mendukung pariwisata
4	Dinas Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi keberadaan UKM di lokasi objek wisata - Mendorong pertumbuhan UMKM terutama yang berada pada sekitar lokasi objek wisata - Pendaftaran usaha dan ijin usaha/berjualan
5	Kelurahan/Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk dan bimbingan pada masyarakat, terutama yang berada pada lokasi wisata - Memberikan pelatihan dan dukungan penguatan kepada masyarakat - Memfasilitasi kegiatan pengembangan kegiatan pendukung pariwisata
6	BTNGC	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan peningkatan perijinan lembaga pengelola pariwisata - Bersama Pemda mendorong pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola pariwisata - Data sharing perkembangan objek wisata di kawasan TNGC
7	Perum Perhutani/KPH Kuningan	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama Pemda dan masyarakat mendorong pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola pariwisata - Data sharing perkembangan objek wisata di kawasan Perhutani
8	Kelompok Sadar Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan wisata pada level bawah
9	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Sharing pengetahuan kepada masyarakat pengelola pariwisata - Pengkajian model dan <i>business plan</i> pengembangan pariwisata bersama pemda - Pengkajian <i>roadmap</i> pengembangan ekonomi kawasan
10	DPMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan perijinan usaha wisata - Penetapan perijinan usaha penanaman modal

Sumber: diolah penulis, 2023

Pada hasil perhitungan lainnya, terdapat 10 aktor lain yang tidak kalah penting dari proses penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Terdapat 2 (dua) aktor dengan nilai *centrality* diatas 10 yaitu BAPPEDA dan pihak swasta. BAPPEDA dan swasta merupakan aktor setelah DISPORAPAR yang paling banyak berinteraksi dengan aktor lainnya. BAPPEDA sebagai badan yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan anggaran pada pemerintah daerah, berperan dalam mensinkronkan setiap prioritas kegiatan bersama lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam sektor pariwisata baik langsung maupun tidak langsung, termasuk pada urusan perjanjian kesepakatan kerjasama BTNGC dan Perhutani, seluruh korespondensi dilaksanakan dan diatur melalui BAPPEDA sebagai perwakilan lembaga pemerintah daerah. Penyajian temuan pada visualisasi jaringan aktor penyelenggara pariwisata kabupaten Kuningan akan dijelaskan melalui bagian pembahasan berikut.

Dalam konsep tata kelola kolaborasi dijelaskan bahwa tata kelola merupakan salah satu upaya bersama dalam pelibatan seluruh pihak terkait (stakeholder) dalam pengambilan ataupun pelaksanaan suatu keputusan (Ansell & Gash, 2007). Stakeholder terkait dapat berupa badan pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat ataupun Lembaga masyarakat dimana tujuan utamanya adalah bagaimana suatu keputusan yang dibuat, nantinya akan dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan dirasakan manfaatnya

secara bersama pula. Namun, dalam pelaksanaan tata kelola kolaborasi, pemaknaan akan konsep ini seringkali menjadi kabur, hal ini disebabkan karena pada praktiknya tindakan aktor yang terlibat pada tataran kolaborasi sangat ditentukan dengan persepsi atau interpretasi tujuan masing-masing aktor yang dalam pemaknaan pencapaian tujuan serta bagaimana lingkungan sekitarnya mempengaruhi persepsi dan tindakan yang akan dilakukan (Liu, 2016). Bahkan pada beberapa kondisi kolaborasi baru akan berjalan ketika seluruh aktor telah memiliki kesamaan berprinsip, memiliki motivasi yang sama sehingga kemudian akan memunculkan kapasitas untuk bertindak secara bersama/tergintegrasikan (Emerson & Nabatchi, 2015).

Untuk membantu melihat bagaimana tata kelola kolaborasi, juga dapat dilihat dengan menganalisis jaringan aktor yang terlibat pada suatu kebijakan, program ataupun kebijakan. Jaringan aktor dalam tata kolaborasi dimaknai sebagai bagaimana hubungan saling interaksi yang menggambarkan suatu koneksi antar aktor dalam suatu sistem atau ruang lingkup yang sama sehingga dengan melihat jaringan aktor, maka akan dapat dilihat juga siapa saja yang berperan dalam pencapaian tujuan, apakah bersifat dua arah atau lebih atau bahkan terkonsentrasi pada satu aktor dominan (Bodin et al., 2006b).

Dalam hal ini tata kelola pariwisata di kabupaten Kuningan, berdasarkan temuan di lapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait koneksi antar aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata. koneksi jaringan antar aktor pada penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan secara empirik telah terbentuk, yaitu dengan munculnya aktor-aktor lain baik dari Pemerintah Daerah maupun dari aktor diluar pemerintahan seperti sektor swasta dan kelompok masyarakat. Namun, dalam kaitannya hubungan yang terjadi antar aktornya masih terbangun secara parsial. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan karena masing-masing aktor menjalankan kebijakan atau pencapaian tujuan masih didasarkan atas perintah yang tertuang pada aturan dan belum merujuk pada persamaan persepsi dan tujuan dalam pencapaian tujuan peningkatan pariwisata. Sehingga peran dominan DISPORAPAR dalam mengatur serta juga melaksanakan kebijakan terkait pariwisata masih sangat kuat. Dalam hal ini terjadi karena hubungan antar aktor masih terbentuk karena adanya ketidaksamaan dalam pemahaman pencapaian tujuan penyelenggaraan pariwisata karena masing-masing aktor bergantung pada satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka karena sumber daya seperti uang, personel, informasi, keterampilan, dan pihak berwenang tidak terkonsentrasi di tangan salah satu aktor, tetapi tersebar di berbagai pelaku berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dinas terkait (Liu, 2016).

Dalam hal perencanaan dan penganggaran BAPPEDA kemudian berperan dalam menginventarisir kegiatan-kegiatan pariwisata yang bersumber baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, yang disesuaikan dengan rencana pengembangan pariwisata sesuai dengan prioritas kegiatan. Hal inilah yang menjadi salah satu permasalahan, dimana ketika satu aktor merasa tidak mendapatkan proporsi baik secara penganggaran dan tidak terlibat langsung pada sektor pariwisata, maka sikap keengganan kemudian dapat muncul dalam proses pelaksanaan kolaborasi. Sedangkan pada praktiknya, meskipun dalam hal ini DISPORAPAR merupakan lembaga teknis penyelenggara urusan pariwisata, namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan pariwisata membutuhkan kolaborasi antar sektor yang saling berkaitan dengan pariwisata. Apalagi, urusan pariwisata tidak hanya membahas terkait potensi wisata, namun melibatkan semua sektor yang terdampak langsung ataupun tidak langsung dari adanya aktivitas pariwisata, termasuk pada urusan pemasaran, ekonomi kreatif dan industri.

Sedangkan pihak swasta merupakan aktor yang penting dan berkontribusi signifikan pada peningkatan pariwisata pada Kabupaten Kuningan. Sektor swasta berperan dalam penyediaan akses, sarana serta jasa layanan pada lokasi objek wisata termasuk berperan sebagai motor penggerak dalam menyediakan modal dalam pembangunan spot pariwisata. Hal ini karena karena sektor swasta memiliki keunggulan tidak hanya dalam kepemilikan tenaga profesional, penyediaan serta kedinamisan organisasi yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan pelanggan yang sangat berbeda dengan cara kerja birokrasi pemerintahan (Cahyo & Nuryanti, 2018). Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha restoran yang berada pada lokasi sekitaran tempat wisata dapat terlihat, meskipun secara makro pariwisata belum banyak memberikan sumbangan pada penerimaan keuangan daerah, namun dampak langsung dari adanya usaha restoran dan penginapan dapat dirasakan oleh penduduk sekitar yang memiliki kemudahan akses dalam pencarian lapangan pekerjaan.

Pihak TNGC dan Perum Perhutani juga tidak kalah pentingnya, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur kawasan Taman Nasional. Penguatan kerjasama kedua lembaga ini tertuang dalam (Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai Dengan Bupati Kuningan, 2021) melalui penguatan fungsi TNGC dengan pengembangan wisata alam berbasis pemberdayaan masyarakat. Penguatan tersebut mencakup pengembangan penguatan kelembagaan, pengembangan potensi wisata alam dan pemberdayaan masyarakat.

Dinas lainnya yang sangat berkaitan erat dengan penyelenggaraan industri pariwisata yaitu Dinas Koperasi dan UKM dan DPMPTSP. Kedua dinas ini sangat berperan penting dalam usaha pariwisata. DPMPTSP merupakan lembaga teknis dalam menyelenggarakan izin prinsip dan izin usaha penanaman modal. Sedangkan Dinas Koperasi dan UKM berfungsi sebagai lembaga yang mengatur segala perijinan dan persuratan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Industri. Hal ini tentunya sangat terkait dengan salah satu urusan pariwisata yaitu menciptakan iklim ekonomi kreatif yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi wisata.

Kelurahan/desa dan Kelompok Sadar Wisata sebagai ujung tombak level terbawah pariwisata memiliki peranan yang juga krusial. Peranan kelompok ini sangat menentukan bagaimana penyelenggaraan pariwisata berlangsung karena kelompok inilah yang memahami secara detail bagaimana wilayah serta kondisi demografi masyarakat. Selain pariwisata, kelompok ini juga merupakan para aktor yang mendapatkan manfaat dari semakin berkembangnya pariwisata, karena industri pariwisata yang maju, juga akan berdampak pada ekonomi kreatif yang ada di wilayah tersebut. Misalnya pada pembentukan Desa Wisata Desa Pinunggul, keterlibatan kelompok ini tidak hanya membantu dalam memfasilitasi jasa pariwisata namun juga terlibat dalam menyediakan pemasaran hasil kreasi industri khas Kabupaten Kuningan yang dapat digunakan sebagai cinderamata. Hal inilah yang diharapkan mampu dalam meningkatkan kondisi perekonomian dan sosial di lingkungan masyarakat di wilayah desa/kelurahannya dan diharapkan berdampak pada peningkatan perekonomian pada Kabupaten Kuningan. Selain itu Pemerintah desa selaku fasilitator bersama Perguruan Tinggi senantiasa bekerja sama dalam pengembangan kualitas masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif di desa. Terdapat beberapa universitas yang berkolaborasi diantaranya yaitu *Institute for Research and Empowerment/IRE* Jogjakarta dalam mengkaji *Model and Business Plan* pemberdayaan ekonomi lokal, Pengembangan Desa Wisata, bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata/STP Trisakti, Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kawasan Waduk Darma, bekerja sama dengan Universitas Pasundan/UNPAS Bandung (DISPORAPAR Kabupaten Kuningan, 2023).

Selain aktor utama yang memiliki nilai *centrality* yang tinggi, pada jaringan sosial ini sebenarnya terdapat 10 (sepuluh) aktor lainnya yang memiliki peran, namun nilai *centrality* nya rendah. Perlu dipahami bahwa nilai *centrality* yang rendah tidak menunjukkan bahwa kesepuluh aktor tersebut merupakan aktor yang tidak penting. Hasil perhitungan menunjukkan aktor tersebut masih berperan dalam pengelolaan industri pariwisata namun memiliki peran yang terbatas atau jarang berinteraksi dengan aktor lainnya seperti pada Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Sekretariat Daerah secara normatif aktor tersebut dalam rencana aksi terlibat pada kegiatan pengelolaan pariwisata, namun dalam analisis dokumen dan wawancara, aktor tersebut tidak memiliki interaksi langsung dengan aktor-aktor lainnya.

Permasalahan lainnya terkait kolaborasi pada dinas tersebut diantaranya pada Dinas Pendapatan Daerah menghadapi hambatan sistemik, yaitu kurangnya peran aktif dalam pengembangan potensi pendapatan dari sektor wisata karena hanya berfokus pada aspek penerimaan daerah. Dinas Lingkungan Hidup mengalami hambatan koordinasi, seperti kurangnya program khusus terkait pengelolaan lingkungan kawasan wisata dan minimnya integrasi aspek lingkungan dalam pengembangan wisata, serta terbatasnya keterlibatan dalam perencanaan pengembangan wisata berkelanjutan. Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian, sebagai aktor tidak aktif, masing-masing menghadapi hambatan teknis dan sektoral. Dinas Perhubungan mengalami kurangnya integrasi perencanaan transportasi dengan destinasi wisata, terbatasnya program pengembangan aksesibilitas kawasan wisata, dan minimnya koordinasi dalam pengaturan transportasi wisata. Sementara itu, Dinas Pertanian belum optimal dalam mengembangkan agrowisata karena minimnya program pengembangan wisata berbasis pertanian. Terakhir, Sekretariat Daerah menghadapi hambatan struktural, di mana perannya terbatas pada koordinasi administratif dan kurangnya fungsi strategis dalam pengembangan pariwisata, serta minim terlibat dalam implementasi program pengembangan industri pariwisata.

Aktor pendukung, yang terdiri dari Kecamatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (DPPP), Media Lokal, serta Komunitas/Paguyuban Pengelola Objek Wisata, juga menghadapi hambatan yang beragam. Kecamatan, mengalami hambatan struktural karena posisinya sebagai perantara antara Kabupaten dan Desa, yang menyebabkan peran yang tumpang tindih dan minimnya kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata. Dinas PUPR dan DPPP menghadapi hambatan koordinasi dan teknis, seperti kurangnya integrasi perencanaan infrastruktur dengan pengembangan pariwisata dan minimnya sinkronisasi program dengan DISPORAPAR. Media Lokal, sebagai aktor pendukung, juga menghadapi hambatan operasional. Peran mereka terbatas sebagai media informasi dan kurang terlibat dalam perencanaan strategis pariwisata. Selain itu, minimnya program kerja sama berkelanjutan dengan pengelola wisata juga menjadi hambatan. Komunitas/Paguyuban Pengelola Objek Wisata, di sisi lain, menghadapi hambatan kelembagaan. Kapasitas organisasi mereka masih terbatas,

kurangnya pengakuan formal dalam struktur pengelolaan, dan minimnya akses terhadap pengambilan keputusan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut perlu diatasi untuk mengoptimalkan pengembangan potensi industri pariwisata di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis jaringan aktor pada tata kelola kolaborasi penyelenggaraan industri pariwisata di Kabupaten Kuningan, terlihat bahwa tata Kelola kolaborasi telah terlaksana dengan melibatkan seluruh unsur aktor baik dari pemerintah, pihak swasta dan juga keterlibatan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kolaborasi masih dilaksanakan secara parsial, yang mana kolaborasi belum dilaksanakan sesuai prinsip kolaborasi dimana syarat yang harus terpenuhi adalah kolaborasi baru akan muncul ketika seluruh aktor memiliki persamaan prinsip dan pemaknaan yang sama terkait tujuan yang ingin dicapai. Pelaksanaan tata Kelola kolaborasi masih didasarkan atas dampak dari penetapan aturan yang mengingkari, yang mengharuskan para aktor terkait berperan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi. Hal tersebut kemudian memicu adanya konflik karena pelaksanaan tugas dan fungsi akan berdampak pada pemanfaatan anggaran pada masing-masing sektor, khususnya pada sektor yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan pariwisata, sehingga terlihat aktor yang dominan dalam penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan adalah DISPORAPAR dan BAPPEDA selaku dinas teknis dan badan perencanaan dan penganggaran kegiatan atau program. Dalam penelitian ini, perlu ditegaskan bahwa pemetaan aktor dilaksanakan dengan melihat aturan atau dasar hukum yang didalamnya menyebutkan aktor terkait serta aktor-aktor yang namanya disebutkan oleh informan pada saat wawancara berlangsung, sehingga kajian ataupun penelitian mendalam terkait identifikasi aktor lain secara lebih mendalam berdasarkan studi empirik akan sangat berguna dilaksanakan pada penelitian lanjutan.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu publikasi penelitian Jaringan Aktor Dalam Tata Kelola Kolaborasi Industri Pariwisata ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Tim Editorial dan Tim Reviewer Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora dalam membantu terbitnya naskah artikel ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abror, B. H. Al, & Manullang, O. R. (2019). Layanan Transportasi dalam Pengembangan Pariwisata di Kabuapten Kerinci. In *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*.
- Agarwal, N., Dokooohaki, N., & Tokdemir, S. (2019). *Emerging research challenges and opportunities in computational social network analysis and mining*. Springer.
- Altuntas, F., Altuntas, S., & Dereli, T. (2022). Social network analysis of tourism data: A case study of quarantine decisions in COVID-19 pandemic. *International Journal of Information Management Data Insights*, 2(2), 100108. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijime.2022.100108>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, November, 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ariyani, N., Fauzi, A., Umar, F., Gambar, S., Waduk, K., & Ombo, K. (2020). *Model hubungan aktor pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo adalah kawasan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah . Waduk terbesar se-Asia*. 23(2), 357–378.
- Aulya, P. D. (2021). *Analisis Promosi Pariwisata Melalui Media Sosial Instagram oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan*. repository.bakrie.ac.id.
- Baggio, R. (2020). Tourism destinations: A universality conjecture based on network science. *Annals of Tourism Research*, 82, 102929. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102929>
- BAPPEDA Kuningan. (2023). *Rencana Aksi Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kabupaten Kuningan*.
- Bigbox. (n.d.). *Definisi & Manfaat Social Network Analysis*. 2020.
- Bimo Pratama. (2020). *Penerapan Tools Ucinet untuk Social Network Analysis Guna Mendapatkan Pola Interaksi*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Bodin, Ö., Crona, B., & Ernstson, H. (2006a). Social networks in natural resource management: what is there to learn from a structural perspective? *Ecology and Society*.
- Bodin, Ö., Crona, B., & Ernstson, H. (2006b). Social networks in natural resource management: what is there to learn from a structural perspective? *Ecology and Society*. <https://www.jstor.org/stable/26266035>
- BPS Kabupaten Kuningan. (2022a). *Kabupaten Kuningan Dalam Angka 2022*.
- BPS Kabupaten Kuningan. (2022b). *Persentase Penduduk Miskin (Persen), 2020-2022*.

- Cahyo, E. D., & Nuryanti, W. (2018). Peran sektor pemerintah dan swasta dalam perkembangan destinasi wisata di Kabupaten Pulau Morotai. In *Gajah Mada Journal Of Tourism Studies*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/108945486/25427.pdf>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The sage handbook of qualitative research* (fifth). Sage.
- DISPORAPAR Kabupaten Kuningan. (2023). *Potensi Pembangunan Kawasan Pedesaan Kabupaten Kuningan*.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the productivity of collaborative governance regimes: A performance matrix. *Public Performance and Management Review*, 38(4), 717–747. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016>
- Feng, N., Li, J., & Zhang, G. (2013). *A Study of the Structure of China's Mainstream Online Tourism Information Network Based on SNA BT - Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem* (F. Bian, Y. Xie, X. Cui, & Y. Zeng, Eds.; pp. 541–552). Springer Berlin Heidelberg.
- Fransisca, M. (2021). Komunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Kasus pada Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Kabupaten Kuningan. *Journal Signal*.
- Fyall, A., & Garrod, B. (2005). From Competititon to Collaboration in The Tourism Industry. In W. Theobald (Ed.), *Global Tourim* (3rd ed., pp. 52–74). Elsevier.
- González, O. L., Rodríguez, R. M., & ... (2022). Actor networks and development of cultural tourist destinations. *Handbook of Research ...*
- Hamzana, A. A. (2018). Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*.
- Hanneman, R. A., & Riddle, M. (2005). Introduction to social network methods: Table of contents. In *University of California, Riverside: Riverside, CA, USA*.
- Irfan, P., & Apriani, A. (2017). Analisa Strategi Pengembangan E-Tourism Sebagai Promosi Pariwisata Di Pulau Lombok. *ILKOM Jurnal Ilmiah*.
- Kadarisman, A. (2021). Government public relations dalam pengembangan pariwisata masa pandemi COVID-19 di Geopark Ciletuh. *PRofesi Humas*.
- Kristiana, Y., Suryadi, M. T., & ... (2018). Eksplorasi potensi wisata kuliner untuk pengembangan pariwisata di Kota Tangerang. ... *Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan ...*
- Latianingsih, N. (2019). Model Pengembangan Kebijakan Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Law and Justice*.
- Leksmanawati, W. (2017). *Tata kelola kolaboratif kebijakan jaminan kesehatan nasional*.
- Li, X., Geng, S., & Liu, S. (2022). Social Network Analysis on Tourists' Perceived Image of Tropical Forest Park: Implications for Niche Tourism. *SAGE Open*, 12(1), 21582440211067244. <https://doi.org/10.1177/21582440211067243>
- Liu, Y. (2016). A governance network perspective on environmental conflicts in China: findings from the Dalian paraxylene conflict. *Policy Studies*, 37(4), 314–331. <https://doi.org/10.1080/01442872.2016.1157853>
- Mariane, I., Palls, A., & Ariesmansyah, A. (2022). Model Policy Network Dalam Menunjang Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Kuningan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 171–180.
- Masniati, A., Susiati, S., Tuasalamony, K., & ... (2021). Implementasi Nilai Budaya Lokal Sebagai Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Buru. *Sang Pencerah ...*
- Masruroh, R., & Nurhayati, N. (2016). Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan. ... (*SENIT*) 2016 Pengembangan ...
- Maturbongs, E. E., & Lekatompessy, R. L. (2020). Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Merauke. In *Sumber*. <download.garuda.kemdikbud.go.id>.
- Maulana, A. (n.d.). *Social Network Analysis (SNA)*. 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Pedoman (2013).
- Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai Dengan Bupati Kuningan (2021).
- R studio. (2022). *R Studio*.
- Ruan, H., Chen, J., Wang, C., Xu, W., & Tang, J. (2022). *Social Network, Sense of Responsibility, and Resident Participation in China's Rural Environmental Governance*.
- Sugiono, A., & Thoha, M. (2002). *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kuningan Jawa Barat*. <etd.repository.ugm.ac.id>.
- Suryatman, D., & Setiowati, N. E. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Manis Kidul Dalam Menunjang Pendidikan Formal Di Objek Wisata Cibulan Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. *Eduksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 5(1).

- Taufik. (2017). Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik Taufik. *AL-IJTIMA'Y-International Journal of Government and Social Science*, 2,(2), 219–234.
- Temiraliyeva, Z., Abdykulova, K., Baibasheva, G., Sadykov, Z., Nakipova, G., & Tokaeva, L. (2021). Economic analysis and factors influencing the development of tourism. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 12(8), 2109–2120. [https://doi.org/10.14505/jemt.v12.8\(56\).10](https://doi.org/10.14505/jemt.v12.8(56).10)
- Utami, S. R., Safitri, R. N., & Kuncoroyakti, Y. A. (2021). Analisis Jaringan dan Aktor # BatalkanOmnibusLaw di Media Sosial Twitter Menggunakan Social Network Analysis (SNA) topik populer yang berupa tagar pada Twitter adalah # BatalkanOmnibusLaw . # BatalkanOmnibusLaw yang ramai menjadi pembicaraan warganet se. *Journal Of Media and Communication Science*, 4(3), 135–148.
- Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social network analysis: Methods and applications*. Cambridge university press.
- Yang, G., Yang, Y., Gong, G., & Gui, Q. (2022). The Spatial Network Structure of Tourism Efficiency and Its Influencing Factors in China: A Social Network Analysis. In *Sustainability* (Vol. 14, Issue 16). <https://doi.org/10.3390/su14169921>
- Yi, J., Ryan, C., & Wang, D. (2020). China's Village Tourism Committees: A Social Network Analysis. *Journal of Travel Research*, 60(1), 117–132. <https://doi.org/10.1177/0047287519892324>